



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU**

JALAN RAYA PADANG KEMILING KM. 12,5 RT. 02 KELURAHAN PEKAN
SABTU KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU TELEPON (0736) 53017
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.bkl@kkp.go.id

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Bengkulu

4 Mei 2026

Di,-

Jl. Soekarno Hatta No.01, Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu

**SURAT PENGANTAR
NOMOR:B.431/SPPMHKP.BKL/TU.210/V/2026**

NO	DOKUMEN /ALAT YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini terlampir kami sampaikan: LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 (Audited) STASIUN PPMHKP BENGKULU BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	1(satu) berkas	Demikian disampaikan dengan hormat untuk diproses sebagai mana mestinya

Catatan: setelah diterima dan ditandatangani Surat Pengantar ini mohon difax/dikirim kembali.

Diterima tanggal : Mei 2026
Penerima :
Nama/Jabatan :
Tandatangan dan cap :
No Telp :

Plt. Kepala Stasiun PPMHKP
Bengkulu



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kukuh Andias Purbianto

**STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BENGKULU**

(649622)

**LAPORAN KEUANGAN
(AUDITED)**

Tahun Anggaran 2025

JALAN RAYA PADANG KEMILING
KM.12,5
RT.02 KELURAHAN PEKAN SABTU
KECAMATAN SELEBAR KOTA
BENGKULU
TELP. (0736) 53017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
VI. Lampiran	

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk

meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkulu, 4 Mei 2025

Plt. Kepala,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kukuh Andias P., S.Pi

NIP. 19810521 200502 1 002

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
JL.RAYA PADANG KEMILING RT.01 PEKAN SABTU BENGKULU
TELEPON 0736 53017, FAXIMILE 0736-53017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, 4 Mei 2025

Plt. Kepala,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kukuh Andias P., S.Pi

NIP. 19810521 200502 1 002

Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.6.673.000 atau mencapai 89 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp7.500.000. Pendapatan Negara Bukan Pajak ini terdiri dari Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi lainnya senilai Rp5.783.000 dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin senilai Rp890.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp3.188.595.062 atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.347.351.000. Realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai

senilai Rp1.552.705.097 dan belanja barang sebesar Rp1.635.889.965. Tahun anggaran 2025 Stasiun PPMHKP Bengkulu tidak memiliki anggaran untuk belanja modal.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 audited. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp8.899.801.062 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.945.340; Aset Tetap (neto) sebesar Rp8.895.855.722; Kewajiban jangka pendek Rp9.962.560 yang terdiri dari akrual langganan listrik Rp6.515.998; internet Rp2.867.805 dan telepon Rp578.757; dan Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp8.899.801.062.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.783.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.582.659.486, sehingga terdapat Defisit dari kegiatan operasional senilai Rp(3.576.876.486). Surplus kegiatan

non operasional dan defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp(839.256) dan sebesar Rp(3.576.988.242) serta surplus/defisit pelepasan aset non lancar sebesar Rp727.500 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.576.988.242).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp9.265.357.129 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp3.576.988.242) ditambah dengan Koreksi Lain-lain sebesar Rp(950.338) dan Transaksi antar Entitas sebesar Rp3.202.419.953 sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp8.889.838.502.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (AUDITED) DAN TA 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	TA. 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	7.500.000	6.673.000	88,97	6.155.000
JUMLAH PENDAPATAN		7.500.000	6.673.000	88,97	6.155.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.594.161.000	1.552.705.097	97,40	1.461.774.212
Belanja Barang	B.4	1.753.190.000	1.635.889.965	93,31	1.969.779.148
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	283.486.000
JUMLAH BELANJA		3.347.351.000	3.188.595.062	95,26	3.715.039.360

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU**

NERACA

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)
DAN TA 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31-Des-2025	TA 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.6	-	-
Persediaan	C.1.7	3.945.340	4.128.706
JUMLAH ASET LANCAR		3.945.340	4.128.706
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	3.177.802.000	3.177.802.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.631825.981	4.619.914.206
Gedung dan Bangunan	C.2.3	6.248.223.130	6.248.223.130
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	132.610.300	132.610.300
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	9.050.000	9.050.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(5.303.655.689)	(4.914.494.540)
JUMLAH ASET TETAP		8.895.855.722	9.273.105.096
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	0	-
Aset Lain-Lain	C.3.2	0	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	0	-
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		8.899.801.062	9.277.233.802
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	9.962.560	11.876.673
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Uang Muka Dari KPPN	C.4.3	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.4	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		9.962.560	11.876.673
JUMLAH KEWAJIBAN		9.962.560	11.876.673
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	8.889.838.502	9.265.357.129
JUMLAH EKUITAS		8.889.838.502	9.265.357.129
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.899.801.062	9.277.233.802

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)
DAN TA.2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	TA. 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.783.000	3.500.000
JUMLAH PENDAPATAN		5.783.000	3.500.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.552.705.097	1.461.774.212
Beban Persediaan	D.3	72.303.701	32.845.439
Beban Barang dan Jasa	D.4	600.060.325	763.132.314
Beban Pemeliharaan	D.5	914.013.332	845.171.571
Beban Perjalanan Dinas	D.6	67.440.495	326.858.027
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	376.136.536	424.616.470
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		3.582.659.486	3.854.398.033
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.576.876.486)	(3.850.898.033)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		727.500	-
Pendapatan Pelepasan Aset		890.000	-
Beban Pelepasan Aset		162.500	-
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		(839.256)	2.655.000
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		839.256	-
Jumlah surplus/defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(111.756)	2.655.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.576.988.242)	5.310.000
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.576.988.242)	(3.848.243.033)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)
DAN TA. 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	TA. 2024
EKUITAS AWAL	E.1	9.265.357.129	9.715.629.302
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.576.988.242)	(3.848.243.033)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(950.338)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(950.338)	-
KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.202.419.953	3.397.970.860
Ditagihkan ke Entitas Lain		-	-
Diterima Dari Entitas Lain		-	-
Transfer Keluar		-	-
Transfer Masuk		-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(375.518.627)	(450.272.173)
EKUITAS AKHIR	E.5	8.889.838.502	9.265.357.129

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu

Dasar Hukum Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu merupakan instansi *Entitas dan* Vertikal di bawah Organisasi Badan Pengendalian dan *Rencana* Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Entitas *Strategis* berkedudukan di Jalan Raya Padang Kemiling KM.12,5 RT.02 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir. Fungsi utamanya meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan inspeksi/sertifikasi, monitoring produk, serta penyetaraan standar internasional.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu berkomitmen “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan

negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”

Beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan sistim akuntansi kepada Kementerian Negara/Lembaga secara berkelanjutan
- Pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi

Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester III Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Bengkulu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4) *Beban*

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) *Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
<i>Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</i>	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp6.673.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.673.000 atau mencapai 89 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp7.500.000. Pendapatan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	890.000	-
Pendapatan Penggunaan Saranan dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	7.500.000	5.783.000	77,11
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-		
Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-		
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-
Jumlah	7.500.000	6.673.000	88,97

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 sebesar 89 persen, tidak tercapainya target tahun ini dikarenakan UPI berHACCP di lingkup Bengkulu yang semula terdapat 7 UPI berkurang menjadi 5 UPI, sehingga berkurangnya UPI yang melaksanakan pengujian untuk sertifikasi SMKHP.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan TA. 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	5.783.000	3.320.000	74,19
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.655.000	-100,00
Pndapatan Jasa Karantina Perikanan	-	180.000	-100,00
Pendapatan dari penjualan alat dan mesin	890.000	0	0
Jumlah	6.673.000	6.155.000	8,42

Realisasi Belanja

B.2 Belanja

Negara

Rp3.188.595.062

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.188.595.062 atau 95 dari anggaran belanja sebesar Rp3.347.351.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31
Desember 2025*

Uraian	1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.594.161.000	1.552.705.097	97,40
Belanja Barang	1.753.190.000	1.635.889.965	93,31
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	3.347.351.000	3.188.595.062	95,26

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 Periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 7,08% dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena tidak adanya belanja modal dan penurunan belanja barang karena adanya efisiensi anggaran.

*Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember
2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI PERIODE 31 DESEMBER 2025	REALISASI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.552.705.097	1.461.774.212	6,22
Belanja Barang	1.635.889.965	1.969.779.148	(16,95)
Belanja Modal	-	-	100,00
Jumlah	3.188.595.062	3.431.553.360	(7,08)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp1.552.705.097 Realisasi Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.552.705.097 dan Rp1.461.774.212. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,22 persen dari TA 2024. Hal ini dikarenakan pengangkatan 4 orang PPNP menjadi PPPK.

*Perbandingan Belanja Pegawai Periode 31 Desember
2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI PERIODE 31 DESEMBER 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	572.970.009	652.462.493	(12,18)
Belanja gaji dan tunjangan PPPK	113.616.199	53.925.320	110,69
Belanja Lembur	193.016.000	119.975.000	60,88
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	673.102.889	635.411.399	5,93
Jumlah Belanja	1.552.705.097	1.461.774.212	6,22

Belanja Barang

B.4 Belanja Barang

Rp1.635.889.965

Realisasi Belanja Barang Periode 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.635.889.965 dan Rp1.969.779.148. Realisasi

Belanja Barang Periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan 16,95 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran.

*Perbandingan Belanja Barang Periode 31 Desember
2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	1.635.889.965	1.969.779.148	(16,95)
Jumlah Belanja	1.635.889.965	1.969.779.148	(16,95)

Belanja Modal Rp B.5 Belanja Modal

0

Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Stasiun PPMHKP Bengkulu TA 2024-2025 tidak mendapatkan anggaran belanja modal, sehingga tidak memiliki realisasi anggaran belanja modal. Adapun rincian realisasi sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode 31
Desember 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI PERIODE 31 Desember 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja modal peralatan dan mesin	0	0	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas

*dibendahara
pengeluaran*

Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Nilai uang persediaan yang ada di kas bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Nilai uang persediaan yang ada di kas bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian nilai kas di bendahara pengeluaran Periode 31
Desember 2025 dan TA 2024*

Jenis	31 Desember 2025	TA 2024
Saldo UP	0	0
Kwitansi UP belum di SPJ	0	0
Jumlah	0	0

Penyisihan

*Piutang Tak
Tertagih -*

C.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah

Piutang Lancar sebesar Rp0 dan Rp0, Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0 – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
 Lancar TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	2025	2024	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak	-	-	
Penyisihan piutang tidak tertagih - piutang bukan pajak	-	-	
Jumlah Piutang Bukan Pajak	-	-	

C.3 Persediaan

Persediaan

Rp3.945.340

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.945.340 dan Rp4.128.706. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan TA 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	3.945.340	
Bahan Baku	-	-
Jumlah	3.945.340	-

Tanah

Rp

3.177.802.000

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 3.177.802.000 dan Rp 3.177.802.000 Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.177.802.00
Tanah	3.177.802.00
Saldo per 31 Desember 2025	3.177.802.00

Tanah kantor terletak di Jl. Raya Padang Kemiling km 12,5 Kelurahan Pekan Sabtu Bengkulu.

Peralatan dan C.5 Peralatan dan Mesin

Mesin

Rp4.631.825.981

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp4.631.825.981 dan Rp4.619.914.206. Terdapat nilai tambah sebesar Rp11.911.715 dari TA 2024. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4.619.914.206
Mutasi tambah:	0
Pembelian	
Hibah	
Transfer Masuk	100.000.000
Koreksi Tambah	
Reklasifikasi masuk	167.399.500
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset dari penggunaan	88.088.225
Reklasifikasi keluar	167.399.500
Saldo per 31 Desember 2025	4.631.825.981

Gedung dan C.6 Gedung dan Bangunan

Bangunan

Rp6.248.223.130

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp6.248.223.130 dan Rp6.248.223.130. Tidak terdapat Mutasi kurang atau mutasi tambah pada gedung dan bangunan dari tahun sebelumnya. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	6.303.745.130
Mutasi kurang:	-
Mutasi tambah:	-
Saldo per 31 Desember 2024	6.303.745.130

Jalan, Jaringan C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

dan Irigasi

Rp132.610.300

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp132.610.300 dan Rp132.610.300 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	132.610.300
Mutasi tambah:	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	132.610.300

Aset Tetap

Lainnya

Rp9.050.000

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 9.050.000 dan Rp 9.050.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang

atas aset tetap ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	9.050.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	9.050.000

Konstruksi

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam

Pengerjaan

Rp0

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Dalam periode sampai 31 Desember 2025 tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah	-	-

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

(Rp4.914.494.540

)

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah (Rp5.128.787.986) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis

atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Akumulasi penyusutan	9.273.105.096	(4.914.494.540)
	Akumulasi Penyusutan	9.273.105.096	(4.914.494.540)

C.11 Aset Tak Berwujud

Aset Tak

Berwujud Rp0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 30 September 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Stasiun PPMHKP Bengkulu sampai periode 31 Desember 2025 tidak memiliki aset tak berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.12 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rpo Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN)

Rincian Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah (Rp5.303.655.689). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset

(Rp5.303.655.689) Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Akumulasi penyusutan	14.199.511.411	5.303.655.689	8.895.855.722
Jumlah	14.199.511.411	5.303.655.689	8.895.855.722

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp9.962.560 Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp9.962.560 dan Rp11.876.673 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga di rincian berikut yaitu SPM (Surat Perintah Membayar) di bulan Desember 2025 yang terbit SP2D di bulan

Januari Tahun 2026. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada Pihak ketiga	6.515.998	Pembayaran Tagihan Listrik
Utang kepada Pihak ketiga	578.757	Pembayaran Tagihan Telepon
Utang kepada Pihak ketiga	2.867.805	Pembayaran Tagihan Internet
Total	9.962.560	

C.15 Ekuitas

Ekuitas

Rp8.889.838.502

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.889.838.502 dan Rp9.265.357.129. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP

Rp5.783.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berturut-turut adalah sebesar Rp5.783.000 dan Rp3.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	% Real Angg.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	5.783.000	3.500.000	60,52
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan(Jasa Giro)	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Jumlah	5.783.000	3.500.000	60,52

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp1.552.705.097

7

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.552.705.097 dan Rp1.461.774.212. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	400.882.800	461.577.000	(13,15)
Beban pembulatan gaji PNS	5.978	7.887	(24,20)
Beban Tunj Suami/ Istri	37.555.020	40.344.720	(6,91)
Beban Tunj Anak	12.217.302	14.908.024	(18,05)
Beban Tunj Struktural PNS	5.040.000	6.120.000	(17,65)
Beban Tunj Fungsional PNS	15.440.000	23.690.000	(34,82)
Beban Tunj PPh PNS	2.159.749	2.021.102	6,86
Beban Tunj Beras PNS	25.202.160	30.995.760	(18,69)
Beban Uang Makan PNS	61.612.000	61.798.000	(0,30)
Beban Tunj Umum PNS	12.855.000	11.000.000	16,86
Beban Gaji Pokok PPPK	77.064.700	38.443.200	100,00
Beban pembulatan gaji PPPK	1.661	912	100,00
Beban Tunj Suami/ Istri PPPK	7.706.470	3.844.320	100,00
Beban Tunj Anak PPPK	2.781.208	1.537.728	100,00
Beban Tunj Beras PPPK	7.097.160	3.476.160	100,00
Beban Uang Makan PPPK	16.790.000	6.623.000	100,00
Beban Tunjangan Umum PPPK	2.175.000		100,00
Beban Uang Lembur	180.000.000	119.975.000	100,00
Beban Uang Lembur PPPK	13.016.000		100,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan/kinerja)	568.003.689	584.361.419	(2,80)
Beban pegawai tunjangan khusus/kegiatan/kinerja PPPK	105.099.200	51.049.980	100,00
Jumlah Beban Kotor	1.552.705.097	1.461.774.212	6,22
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Beban Bersih	1.552.705.097	1.461.774.212	6,22

Beban

Persediaan

Rp72.303.701

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp72.303.701 dan Rp32.845.439. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	52.464.670	32.845.439	60
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	
Beban Persediaan bahan baku	19.839.031	-	0
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0
Jumlah	72.303.701	32.845.439	120

Beban Barang

dan Jasa

Rp600.060.325

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp600.060.325 dan Rp763.132.314. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	75.791.155	117.972.260	(35,76)
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	14.065.560	28.777.276	(51,12)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	669.000	870.000	(23,10)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	68.310.000	52.431.800	30,28
Beban Barang Operasional Lainnya	15.561.500	80.883.500	(80,76)
Beban Barang Operasional -Penanganan Covid-19	0	0	0,00
Beban Bahan	20.900.274	33.970.200	(38,47)
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	4.896.000	66,67
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Beban Jasa Operasional Penanganan Covid-19	0	0	0,00
Beban Langganan Listrik	72.617.320	137.111.076	(47,04)
Beban Langganan Telpon	6.971.516	6.944.202	0,39
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Beban Sewa	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	0	1.400.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	317.014.000	297.876.000	0,00
Jumlah	600.060.325	763.132.314	(21,37)

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

Rp914.013.332

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp914.013.332 dan Rp.845.171.571. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang

sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pemeliharaan pada peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	758.402.000	601.077.000	26,17
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.832.932	241.841.771	(37,22)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	0	0	0,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	3.778.400	2.252.800	67,72
Beban Persediaan suku cadang	0	0	0,00
Jumlah	914.013.332	845.171.571	8,15

Beban

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas

Rp67.440.495

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp67.440.495 dan Rp326.858.027. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	59.084.495	291.348.933	-79,72
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.356.000	22.568.000	-62,97
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	12.941.094	-100,00
Jumlah	67.440.495	326.858.027	-79,37

Terdapat penurunan pada beban perjalanan dinas tahun anggaran 2025 dibandingkan tahun anggaran 2024, hal ini disebabkan efisiensi anggaran.

Beban

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp376.136.536

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp376.136.536 dan Rp424.616.470.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	198.835.202	247.629.371	(20)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173.539.513	173.225.279	0
Beban Penyusutan Irigasi	826.866	826.866	-
Beban Penyusutan Jaringan	2.934.955	2.934.954	0
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	376.136.536	424.616.470	-

Beban

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

D.9 Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Jumlah Beban Operasional periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.582.659.486 dan Rp3.854.398.033 dengan rincian 86 jumlah beban operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Jumlah Beban Operasional periode 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Jumlah Beban Operasional	3.582.659.486	3.854.398.033	7,05
Jumlah	3.582.659.486	3.854.398.033	0,00

D.10 Surplus Kegiatan Operasional

Surplus Dari Kegiatan Operasional Jumlah Surplus dari Kegiatan Operasional periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp3.394.249.992) dan (Rp3.850.898.033) dengan rincian adalah sebagai berikut:
(Rp3.394.249.992)

*Rincian Surplus dari kegiatan operasional periode 31
Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024
Surplus dari Kegiatan Operasional	(3.394.249.992)	(3.850.898.033)
Jumlah	(3.394.249.992)	(3.850.898.033)

D.11 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
(Rp111.756)*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus dari kegiatan non operasional periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah (Rp111.756) dan Rp2.655.000. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	TH 2025	TH 2024
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	0	0
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	890.000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	162.500	0
Beban kerugian pelepasan aset Non Lncar	(839.256)	0
Jumlah Surplus /(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(111.756)	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran Yang Lalu	0	2.655.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)		
Jumlah pendapatan dari kegiatan non operasional	0	2.655.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Beban penyesuaian nilai persediaan	0	0
Jumlah beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	2.655.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(111.756)	2.655.000

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa D.12 Pos Luar Biasa

Rpo

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa

untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Pendapatan PNB diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp9.265.357.12

9

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.265.357.129 dan Rp9.715.629.302.

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp(3.576.988.24

2)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp(3.576.988.242) dan (Rp3.848.243.033). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan

RpO

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	
Jumlah	-

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset

Tetap RpO

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO.

Koreksi Aset

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang

Revaluasi berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp950.338 dan Rp0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	(950.338)
Koreksi nilai aset Tetap/lainnya non revaluasi	-
Jumlah	(950.338)

Koreksi Lain- **E.3.5 Koreksi Lain-Lain**

Lain Rp0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi

E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas

Rp3.202.419.

953

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.202.419.953. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.188.595.062
Diterima dari Entitas Lain	6.673.000
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	20.497.891
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	3.202.419.953

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

- Ditagihkan ke entitas lain sebesar Rp3.431.553.360 merupakan nilai realisasi anggaran Tahun 2025 periode 31 Desember 2025.
- Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp6.155.000 merupakan nilai dari pendapatan negara bukan pajak selama tahun 2025.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Rincian diterima dari entitas lain (DDEL) atau ditagihkan ke entitas lain (DKEL) dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.188.595.062
Diterima dari Entitas Lain	6.673.000
Jumlah	3.195.268.062

E.5 Ekuitas Akhir

Rp8.889.838.50 Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.889.838.502 dan Rp9.265.357.129.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Tidak ada rekomendasi/temuan atas hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Stasiun PPMHKP Bengkulu sampai dengan Tahun 2025.
2. Penetapan status penggunaan BMN
Seluruh BMN (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) telah ditetapkan status penggunaannya pada Stasiun PPMHKP Bengkulu.
3. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi Ekonomi dan sub fungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Stasiun PPMHKP Bengkulu dirinci ke dalam program antaran alin sebagai berikut:
 - a. Program Nilai tambah dan daya saing industri
 - b. Program dukungan manajemen

Laporan Kinerja satuan kerja SKIPM Bengkulu tahun 2025 terlampir.

4. *Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PPMHKP Bengkulu terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I (PN.01)-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.*

Rincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan pencapaian output dari masing-masing Prioritas Nasional pada SKIPM Bengkulu tahun anggaran 2025 periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Prioritas	Anggaran	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	Keterangan
Produk Kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	50.000.000	19.986.000	39,97	Produk	3	3	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target, sisa anggaran ditarik pusat karena adanya efisiensi anggaran
Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	33.580.000	33.577.450	99,99	Lembaga	9	9	Kegiatan tercapai, dana terserap 99,99%
Hasil perikanan di wilayah RI yang	17.415.000	17.403.594	99,93	Produk	1	1	Kegiatan tercapai, dana terserap

divalidasi mutu dan keamanan hasil perikanan							99,93%
UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	10.000.000	0	0	Lembaga	6	6	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target, sisa anggaran ditarik pusat karena adanya efisiensi anggaran
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	105.040.000	104.987.000	99,95	Rekomendasi Kebijakan	1	1	Kegiatan tercapai, dana terserap 99,95%

Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25.000.000	24.850.000	99,40	Lembaga	1	1	Kegiatan tercapai, dana terserap 99,40%
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	10.000.000	9.973.740	99,74	Lembaga	1	1	Kegiatan tercapai, dana terserap 99,74%
Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	8.500.000	0	0	Produk	1	1	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target, sisa anggaran ditarik pusat karena adanya efisiensi anggaran

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	3,945,340	4,128,706	(183,366)	(4.44)
JUMLAH ASET LANCAR	3,945,340	4,128,706	(183,366)	(4.44)
ASET TETAP				
Tanah	3,177,802,000	3,177,802,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,631,825,981	4,619,914,206	11,911,775	0.26
Gedung dan Bangunan	6,248,223,130	6,248,223,130	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	132,610,300	132,610,300	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	9,050,000	9,050,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,303,655,689)	(4,914,494,540)	(389,161,149)	7.92
JUMLAH ASET TETAP	8,895,855,722	9,273,105,096	(377,249,374)	(4.07)
JUMLAH ASET	8,899,801,062	9,277,233,802	(377,432,740)	(4.07)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	9,962,560	11,876,673	(1,914,113)	(16.12)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9,962,560	11,876,673	(1,914,113)	(16.12)
JUMLAH KEWAJIBAN	9,962,560	11,876,673	(1,914,113)	(16.12)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,889,838,502	9,265,357,129	(375,518,627)	(4.05)
JUMLAH EKUITAS	8,889,838,502	9,265,357,129	(375,518,627)	(4.05)
JUMLAH EKUITAS	8,889,838,502	9,265,357,129	(375,518,627)	(4.05)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,899,801,062	9,277,233,802	(377,432,740)	(4.07)

Keterangan :

FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Plt. Kepala



Ditandatangani
Secara Elektronik

KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi

Nip 198105212005021002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,188,595,062
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	6,673,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	890,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	5,783,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	400,882,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,978	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	37,555,020	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,217,302	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5,040,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,440,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,159,749	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	25,202,160	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	61,612,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,855,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	77,064,700	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,661	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,706,470	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,781,208	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7,097,160	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	16,790,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,175,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	180,000,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	13,016,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	568,003,689	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	105,099,200	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	75,788,380	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	14,065,560	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	669,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	68,310,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	15,561,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	20,900,274	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56,240,100	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	74,534,390	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,971,334	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	317,014,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	758,402,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151,832,932	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:49 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,084,495	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,356,000	0
JUMLAH			3,195,268,062	3,195,268,062

Keterangan :

FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Plt. Kepala



Ditandatangani
Secara Elektronik

KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi

198105212005021002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,945,340	0
0.0	131111	Tanah	3,177,802,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,631,825,981	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,248,223,130	0
0.0	134112	Irigasi	27,700,000	0
0.0	134113	Jaringan	104,910,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,050,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,267,301,697
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	999,256,683
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	7,028,361
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	30,068,948
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	9,962,560
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,188,595,062
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,673,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	20,497,891
0.0	391111	Ekuitas	0	9,265,357,129
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	950,338	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	890,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	5,783,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	400,882,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,978	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	37,555,020	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	12,217,302	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5,040,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15,440,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,159,749	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	25,202,160	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	61,612,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,855,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	77,064,700	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,661	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,706,470	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,781,208	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7,097,160	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	16,790,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	2,175,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	180,000,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	13,016,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:49 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	568,003,689	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	105,099,200	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	75,791,155	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	14,065,560	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	669,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	68,310,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	15,561,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	20,900,274	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	72,617,320	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	6,971,516	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	317,014,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	758,402,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151,832,932	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	59,084,495	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,356,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	198,835,202	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173,539,513	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	826,866	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,934,955	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	52,464,670	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,778,400	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	19,839,031	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	162,500	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	839,256	0
JUMLAH			17,794,741,331	17,794,741,331

Keterangan :

FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Plt. Kepala

Ditandatangani
Secara Elektronik



KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi

Nip 198105212005021002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:30 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	9,265,357,129	9,715,629,302	(450,272,173)	(4.63)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,576,988,242)	(3,848,243,033)	271,254,791	(7.05)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(950,338)	0	(950,338)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(950,338)	0	(950,338)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,202,419,953	3,397,970,860	(195,550,907)	(5.75)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(375,518,627)	(450,272,173)	74,753,546	(16.6)
EKUITAS AKHIR	8,889,838,502	9,265,357,129	(375,518,627)	(4.05)

Keterangan :

FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Plt. Kepala



Ditandatangani
 Secara Elektronik

KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi

Nip 198105212005021002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:29 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,783,000	3,500,000	2,283,000	65.229
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,783,000	3,500,000	2,283,000	65.229
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,783,000	3,500,000	2,283,000	65.229
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,552,705,097	1,461,774,212	90,930,885	6.221
Beban Persediaan	72,303,701	32,845,439	39,458,262	120.133
Beban Barang dan Jasa	600,060,325	763,132,314	(163,071,989)	(21.369)
Beban Pemeliharaan	914,013,332	845,171,571	68,841,761	8.145
Beban Perjalanan Dinas	67,440,495	326,858,027	(259,417,532)	(79.367)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:29 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	376,136,536	424,616,470	(48,479,934)	(11.417)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,582,659,486	3,854,398,033	(271,738,547)	(7.05)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,576,876,486)	(3,850,898,033)	274,021,547	(7.116)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	727,500	0	727,500	
Pendapatan Pelepasan Aset	890,000	0	890,000	
Beban Pelepasan Aset	162,500	0	162,500	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(839,256)	2,655,000	(3,494,256)	(131.61)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,655,000	(2,655,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	839,256	0	839,256	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(111,756)	2,655,000	(2,766,756)	(104.209)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,576,988,242)	(3,848,243,033)	271,254,791	(7.049)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,576,988,242)	(3,848,243,033)	271,254,791	(7.049)

Keterangan :

FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Plt. Kepala



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi

Nip 198105212005021002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 2600
SATUAN KERJA : 649622
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BENGKULU
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	470,053,000	401,053,000	400,882,800	0	400,882,800	99.96	170,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	10,000	5,978	0	5,978	59.78	4,022
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	34,482,000	37,582,000	37,555,020	0	37,555,020	99.93	26,980
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10,249,000	12,249,000	12,217,302	0	12,217,302	99.74	31,698
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	6,940,000	6,940,000	5,040,000	0	5,040,000	72.62	1,900,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	28,745,000	15,445,000	15,440,000	0	15,440,000	99.97	5,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,021,000	2,471,000	2,159,749	0	2,159,749	87.4	311,251
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	23,389,000	25,389,000	25,202,160	0	25,202,160	99.26	186,840
511129	Belanja Uang Makan PNS	91,080,000	73,580,000	61,612,000	0	61,612,000	83.73	11,968,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,860,000	12,860,000	12,855,000	0	12,855,000	99.96	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	677,829,000	587,579,000	572,970,009	0	572,970,009	97.51	14,608,991
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	44,851,000	83,351,000	77,064,700	0	77,064,700	92.46	6,286,300
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	10,000	1,661	0	1,661	16.61	8,339
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,500,000	8,500,000	7,706,470	0	7,706,470	90.66	793,530
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,800,000	3,400,000	2,781,208	0	2,781,208	81.8	618,792
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,100,000	7,600,000	7,097,160	0	7,097,160	93.38	502,840
511628	Belanja Uang Makan PPPK	13,505,000	17,505,000	16,790,000	0	16,790,000	95.92	715,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,000,000	2,200,000	2,175,000	0	2,175,000	98.86	25,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	70,757,000	123,566,000	113,616,199	0	113,616,199	91.95	9,949,801
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	100	0
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	13,050,000	13,016,000	0	13,016,000	99.74	34,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	180,000,000	193,050,000	193,016,000	0	193,016,000	99.98	34,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	513,334,000	583,334,000	568,003,689	0	568,003,689	97.37	15,330,311
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	65,332,000	106,632,000	105,099,200	0	105,099,200	98.56	1,532,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	578,666,000	689,966,000	673,102,889	0	673,102,889	97.56	16,863,111
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,507,252,000	1,594,161,000	1,552,705,097	0	1,552,705,097	97.4	41,455,903
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 2600
SATUAN KERJA : 649622
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BENGKULU
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:50 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	198,577,000	76,426,000	75,788,380	0	75,788,380	99.17	637,620
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	36,288,000	14,742,000	14,065,560	0	14,065,560	95.41	676,440
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,824,000	1,000,000	669,000	0	669,000	66.9	331,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	73,440,000	71,010,000	68,310,000	0	68,310,000	96.2	2,700,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	55,951,000	15,795,000	15,561,500	0	15,561,500	98.52	233,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	372,080,000	178,973,000	174,394,440	0	174,394,440	97.44	4,578,560
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	26,185,000	21,861,000	20,900,274	0	20,900,274	95.61	960,726
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	8,160,000	0	8,160,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	34,345,000	30,021,000	29,060,274	0	29,060,274	96.8	960,726
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48,000,000	56,253,000	56,240,100	0	56,240,100	99.98	12,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	48,000,000	56,253,000	56,240,100	0	56,240,100	99.98	12,900
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	180,000,000	74,663,000	74,534,390	0	74,534,390	99.83	128,610
522112	Belanja Langganan Telepon	8,760,000	9,500,000	6,971,334	0	6,971,334	73.38	2,528,666
522141	Belanja Sewa	3,152,000	0	0	0	0		0
522191	Belanja Jasa Lainnya	346,840,000	317,164,000	317,014,000	0	317,014,000	99.95	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	538,752,000	401,327,000	398,519,724	0	398,519,724	99.3	2,807,276
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293,857,000	758,444,000	758,402,000	0	758,402,000	99.99	42,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	251,844,000	151,860,000	151,832,932	0	151,832,932	99.98	27,068
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	545,701,000	910,304,000	910,234,932	0	910,234,932	99.99	69,068
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	323,638,000	157,212,000	59,084,495	0	59,084,495	37.58	98,127,505
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,100,000	19,100,000	8,356,000	0	8,356,000	43.75	10,744,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,147,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	360,885,000	176,312,000	67,440,495	0	67,440,495	38.25	108,871,505
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,899,763,000	1,753,190,000	1,635,889,965	0	1,635,889,965	93.31	117,300,035
	JUMLAH BELANJA	3,407,015,000	3,347,351,000	3,188,595,062	0	3,188,595,062	95.26	158,755,938